



# SKPD Harus Tindak Lanjuti Hasil Temuan

**Borneo Tribune, Sukadana** Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menerima langsung laporan hasil pemeriksaan semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.

Selain Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara H Ibrahim Dahlan. Keduanya menandatangani berkas penerimaan LHP yang diserahkan BPK RI Rabu (12/2).

"Terus berkomitmen untuk meningkatkan laporan Pemerintah Kayong Utara guna kemajuan daerah ini," kata Hildi Hamid.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 9 Tahun 2009 pada point F menyebutkan setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Kepada Pemerintah



**Ketua BPK RI Perwakilan Kalimantan, Hildi Hamid, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II kepada Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid, di aula kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan, Pontianak. FOTO: Humpro KKKU**

nerja laporan harus ditindaklanjuti, seloroh Wagub Kayong Utara, H Hildi Hamid yang duduk satu meja dengannya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar Didi Budi Satrio mengemukakan, penyerahan LHP BPK RI semester II Tahun 2014 tersebut merupakan amarah pasal 23 E Ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006.

dukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan segera dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan, untuk itu dia berharap agar temuan temuan yang ada dapat segera ditindaklanjuti, hal ini mengingat demi baiknya tata kelola keuangan daerah dan demi menghindari *financial distress* karena katanya lagi kegalan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa mempengaruhi terhadap penilaian BPK RI atas penyajian keuangan pemerintah daerah. Dalam penyerahan LHP ini. (DL/Hms)

lebih baik lagi. "Saya melihat Kabupaten Kayong Utara sedikit juga temuan di daerah, menerima hasil laporan

Disampaikan pula hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 ini, akan men-